

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Angka pertumbuhan peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. Proyeksi peserta didik SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta menggambarkan jumlah rombongan belajar yang harus dilayani oleh setiap guru mata pelajaran. Jumlah peserta didik pada SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta diperkirakan pada tahun 2025 adalah sebanyak 28.268 orang dengan jumlah rombongan belajar diperkirakan sebanyak 883 rombel.

Untuk data kecukupan Guru PNS di Kabupaten Purwakarta, pada tahun 2020 tercatat kekurangan guru PNS adalah sebanyak 869 orang. Kekurangan Guru Bimbingan dan Konseling (BP/BK) pada tahun 2020 adalah sebanyak 200 orang guru.

Kekurangan guru PNS yang mengampu mata pelajaran di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta berkembang secara dinamis dan fluktuatif cenderung menurun menyesuaikan dengan menurunnya jumlah proyeksi peserta didik dan rombongan belajar. Namun walaupun kecenderungannya menurun tetapi kebutuhan akan Guru SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta cukup tinggi. Hingga tahun 2025 jumlah kekurangan guru PNS di Kabupaten Purwakarta untuk jenjang SMP adalah sebanyak 687 orang. Jumlah tersebut didapatkan dari banyaknya kebutuhan guru dikurangi oleh guru PNS yang ada dan Guru PNS yang memasuki masa pensiun. Hal yang sama berlaku untuk kekurangan Guru Bimbingan Konseling (BP/BK), hingga tahun 2025 kekurangan guru tersebut pada jenjang SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta adalah sebanyak 198 orang.

Kebijakan pengadaan PNS termasuk didalamnya Guru Mata Pelajaran dan guru Bimbingan Konseling (BP/BK) adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah daerah hanya di dalam pengusulannya dengan memperhatikan data kelembagaan, luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi daerah untuk dikembangkan, jumlah dan komposisi PNS yang tersedia pada setiap jenjang jabatan, jumlah PNS yang akan memasuki batas usia pensiun,

rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk, dan rasio antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran belanja secara keseluruhan.

Untuk membantu meringankan beban sekolah dalam pembiayaan guru Non PNS jenjang SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelenggarakan pembiayaan sebanyak 51 orang Guru Agama dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK), biaya stimulus untuk 258 orang guru Non PNS SMP Negeri Satu Atap, stimulus untuk guru honorer K2 sebanyak 327 orang.

5.2 Implikasi

Berdasarkan simpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kekurangan guru menjadi faktor penyebab penurunan kualitas pembelajaran dan minat belajar peserta didik.
2. Kekurangan guru menjadi faktor penyebab menurunnya kualitas lulusan.
3. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dalam rangka mengantisipasi tren penurunan siswa pada lima tahun ke depan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta telah mengintervensi dengan kebijakan pembuatan *School Sites*, pembuatan video pembelajaran, dan Klinik BDR.

5.3 Rekomendasi

Rekomendasi dibuat berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini. Catatan rekomendasi yang dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus menganggarkan Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk meringankan pembiayaan guru Non PNS yang selama ini dibiayai oleh dana BOS.
2. Dinas Pendidikan agar memprioritaskan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam upaya pemerataan kompetensi guru di Kabupaten Purwakarta.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta agar mempertahankan intervensi kebijakan dalam mengantisipasi tren penurunan siswa, serta meningkatkan upaya tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas.